



JURNAL KONSTITUSI

Volume 12 Nomor 2, Juni 2015

- Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang
Mardian Wibowo
- Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi
Firman Floranta Adonara
- Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi
Mira Fajriyah
- Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Khairul Fahmi
- Rembug Pelayanan Publik (RPM) Sebagai Aktualisasi Pelayanan Publik Berlandaskan Demokrasi Pancasila
Nuriyanto
- Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah
Zulkarnain Ridwan
- Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
M. Lutfi Chakim
- Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air
Helmi Kasim
- Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
Dudu Duswara Machmudin
- Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam
Ahmad Redi

JK	Vol. 12	Nomor 2	Halaman 196 - 421	Jakarta Juni 2015	ISSN 1829-7706
----	---------	---------	----------------------	----------------------	-------------------

Terakreditasi LIPI Nomor: 613/Akred/P2MI-LIPI/03/2015
Terakreditasi DIKTI dengan Nomor: 040/P/2014

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

Vol. 12 No. 2	ISSN 1829-7706	Juni 2015
Terakreditasi LIPI dengan Nomor: 613/Akred/P2MI-LIPI/03/2015 Terakreditasi Dikti dengan Nomor: 040/P/2014		

Jurnal Konstitusi memuat naskah di bidang hukum dan konstitusi, serta isu-isu ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi adalah media dwi-bulanan, terbit sebanyak empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember).

Susunan Redaksi
(*Board of Editors*)

Pengarah
(*Advisers*) : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., MA.
Prof. Dr. Aswanto S.H., M.Si. DFM.
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M. Hum
Dr. Suhartoyo, S. H., M. H.
Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum

Penanggungjawab
(*Officially Incharge*) : Dr. Janedjri M. Gaffar

Pemimpin Redaksi
(*Chief Editor*) : Wiryanto, S.H., M.Hum.

Redaktur Pelaksana
(*Managing Editors*) : Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
Anna Triningsih, S.H., M.Hum
Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.
Ajie Ramdan, S.H., M.H.
Intan Permata Putri, S.H.

Sekretaris
(*Secretariat*) : Udi Hartadi, S.E.
Rumondang Hasibuan, S.Sos.

Tata Letak & Sampul : Nur Budiman
(*Layout & cover*)

Alamat (*Address*)
Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 23529000 Faks. (021) 352177

E-mail: jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id

Jurnal ini dapat diunduh di menu e-jurnal pada laman www.mahkamahkonstitusi.go.id

Isi Jurnal Konstitusi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK



JURNAL KONSTITUSI

Volume 12 Nomor 2, Juni 2015

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii - vi
Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang	
Mardian Wibowo	196-216
Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi	
Firman Floranta Adonara	217-236
Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi	
Mira Fajriyah	237-263
Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu	
Khairul Fahmi	264-283
Rebug Pelayanan Publik (RPM) Sebagai Aktualisasi Pelayanan Publik Berlandaskan Demokrasi Pancasila	
Nuriyanto	284-304
Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah	
Zulkarnain Ridlwan	305-327

Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

M. Lutfi Chakim 328-352

Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas
Air

Helmi Kasim 353-372

Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi
dan Peninjauan Kembali

Dudu Duswara Machmudin 373-400

Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam

Ahmad Redi 401-421

Biodata

Pedoman Penulisan

Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam

Dynamics of State Control Concept on Natural Resources

Ahmad Redi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
Jl. S Parman No.1 Grogol, Jakarta Barat,
E-mail:ahmadr@fh.untar.ac.id

Naskah diterima : 22/03/ 2015 revisi : 25/03/ 2015 disetujui : 27/04/ 2015

Abstrak

Diskursus mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA) dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika tersebut terlihat pada beragamnya konsepsi hak menguasai negara atas sumber daya alam yang dirumuskan dalam berbagai undang-undang di sektor sumber daya alam. Ketiadaan konsep tunggal atas 'hak menguasai negara' akan berdampak pada terancamnya SDA akan lepas dari konsepsi hak menguasai negara dan beralih pada penguasaan bukan oleh negara. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi memiliki peran yang penting untuk memastikan agar suatu undang-undang di sektor SDA benar-benar menganut prinsip penguasaan oleh negara atas SDA Indonesia. Tulisan ini menganalisis mengenai dinamika konsepsi hak menguasai negara atas SDA dalam berbagai undang-undang serta peranan Mahkamah Konstitusi mengawal dan menafsir undang-undang sektor SDA agar sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari hasil analisis didapat kesimpulan bahwa terdapat ragam konsep penguasaan negara atas SDA di berbagai undang-undang sektor SDA. Mahkamah Konstitusi pun telah membuat tafsiran atas hak menguasai negara. Agar konsepsi tersebut semakin kokoh maka diperlukan suatu undang-undang di bidang SDA sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 bahwa ketentuan lebih lanjut Pasal 33 diatur dengan undang-undang. Selain itu, DPR dan Pemerintah harus memastikan konsep hak menguasai negara dalam setiap rancangan undang-undang sektor SDA agar arus liberalisme dan kapitalisme tidak menggerus prinsip hak menguasai negara.

Kata kunci : Penguasaan Negara, Sumber Daya Alam, Mahkamah Konstitusi